**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ndraha, T. (2003). *Teori-Teori Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rivai, V. (2003). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, E. A. (2011). *Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

**REFERENSI/JURNAL:**

Nurhadi, N. (2020). ”Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 15–25.

Sutrisno, H. (2018). “Peran Kepemimpinan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 90–100.

Supriyadi, A. (2020). “Gaya Kepemimpinan dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa”. *Jurnal Kepemimpinan dan Organisasi*, 12(3), 115–123.

Yuliani, D. (2021). “Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Pemerintahan Desa”. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 3(1), 45–55.

Marlina, E., & Saputra, I. (2020). “Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Desa”. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 33–42.

Puspitasari, R. (2019). “Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital oleh Pemerintah Desa”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(2), 76–85.

Azizah, N. (2022). “Implementasi UU Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. *Jurnal Legislasi dan Pemerintahan Desa*, 2(1), 50–60.

**UNDANG-UNDANG**

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009* tentang Pelayanan Publik.

*Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009* tentang Kearsipan (terkait pelayanan dan dokumentasi publik)

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah.

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* tentang Keterbukaan Informasi Publik.

*Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014* tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

*Permendagri Nomor 84 Tahun 2015* tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

*Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014* tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik